

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *MONEY LAUNDERING*
YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1765/Pid-Sus/2022/PN Mdn)**

Angga Ardi Purwoko*
Prof. Dr. Mustamam, M.Ag**
Dr. Panca Sarjana Putra, SH.,M.H***

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum delik tindak pidana pencucian uang, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku *money laundering* yang berasal dari tindak pidana penggelapan dalam putusan PN. Medan Nomor 1765/Pid.Sus.2022/PN Mdn, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan PN. Medan Nomor 1765/Pid.Sus.2022/PN Mdn terkait dengan tindak pidana *money laundering*.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum delik tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pertanggungjawaban pidana pelaku *money laundering* yang berasal dari tindak pidana penggelapan dalam putusan PN. Medan Nomor 1765/Pid.Sus.2022/PN Mdn adalah terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan PN. Medan Nomor 1765/Pid.Sus.2022/PN Mdn terkait dengan tindak pidana *money laundering* adalah seluruh unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang. Penulis tidak setuju hukuman tersebut terlalu ringan sehingga tidak akan menimbulkan efek jera bagi para terdakwa mengingat hukuman yang ringan. Seharusnya hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang paling maksimal yaitu sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencucian Uang, Penggelapan.

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

***Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**CRIMINAL LIABILITY OF MONEY LAUNDERING PERFORMERS
WHICH COMES FROM THE CRIME OF EMBEZZER**
(Study of Medan District Court Decision No. 1765/Pid-Sus/2022/PN Mdn)

Angga Ardi Purwoko*
Prof. Dr. Mustamam, M.Ag**
Dr. Panca Sarjana Putra, SH.,M.H***

ABSTRACT

The crime of money laundering as a crime has a distinctive feature, namely that this crime is not a single crime but multiple crimes. The crime of money laundering does not stand alone because the assets placed, transferred or transferred by means of integration were obtained from a crime, meaning that there was already another crime that preceded it.

The formulation of the problem in this thesis is how the legal regulation of the crime of money laundering is regulated, what is the criminal responsibility of money laundering perpetrators originating from the crime of embezzlement in the District Court's decision. Medan Number 1765/Pid.Sus.2022/PN Mdn, what is the judge's legal consideration in the PN decision. Medan Number 1765/Pid.Sus.2022/PN Mdn related to the crime of money laundering.

The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical legal research, namely research carried out by referring to legal norms, namely researching library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of the research show that the legal regulation of the crime of money laundering are in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of money laundering crimes. Criminal liability of money laundering perpetrators originating from criminal acts of embezzlement in the District Court's decision. Medan Number 1765/Pid.Sus.2022/PN Mdn, the defendant was sentenced to imprisonment for 4 (four) years and a fine of IDR 50,000,000.00 (fifty million rupiah) with the provision that if the fine is not paid it will be replaced by a criminal penalty. imprisonment for 1 (one) month. The judge's legal considerations in the District Court's decision. Medan Number 1765/Pid.Sus.2022/PN Mdn related to the crime of money laundering is that all the elements of the article charged have been fulfilled so that the defendant is legally and convincingly proven guilty of committing the crime of money laundering. The author does not agree that the sentence is too light so that it will not have a deterrent effect on the defendants considering the light sentence. The maximum sentence imposed should be in accordance with Article 3 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering..

Keywords: Crime, Money Laundering, Embezzlement.

**Student of the Law Program at the Islamic University of North Sumatra.*

***Supervising Lecturer I of the Law Program at the Islamic University of North Sumatra*

**** Supervisor I of the Law Program at the Islamic University of North Sumatra*